

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii
Abstrak.....	vii
Mengapa Konflik Berulang Terjadi di Kota Ambon? Tinjauan Demografi dan Keamanan atas Konflik Horizontal Perkotaan <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i>	163-193
Format Baru Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945 <i>oleh: Lili Romli</i>	195-223
Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi <i>oleh: Handrini Ardiyanti</i>	225-241
Dukungan Pemerintah terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Desa di Indonesia dan Cina <i>oleh: Debora Sanur Lindawaty</i>	243-271
Studi tentang Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Provinsi Bali (Desa Ekasari-Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan Kabupaten Jembrana Bali) <i>oleh: Siti Nur Solechah</i>	273-297
Optimalisasi Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat ke DPR RI <i>oleh: Ahmad Budiman</i>	299-327
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal *Politica* yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan wadah bagi para peneliti dan masyarakat akademis lainnya untuk menyampaikan berbagai ide dan gagasan yang terkait dengan dinamika politik dalam dan luar negeri. Jurnal ilmiah ini juga merupakan sumber rujukan bagi pemerhati dan khususnya bagi para pengambil kebijakan di bidang politik baik di DPR RI maupun lembaga Negara lainnya dengan melihat berbagai kajian dan analisis yang tersaji melalui berbagai tulisan di dalamnya. Pada Volume 3 Nomor 2 ini, Jurnal *Politica* menyajikan 6 (enam) tulisan yang merupakan hasil kajian di bidang politik dalam negeri.

Tulisan pertama disajikan oleh Poltak Partogi Nainggolan yang mengangkat judul “Mengapa Konflik Berulang Terjadi di Kota Ambon? Tinjauan Demografi dan Keamanan atas Konflik Horizontal Perkotaan”. Dalam paparannya saudara Partogi menyampaikan bahwa Konflik horizontal terjadi berulang-ulang di Kota Ambon dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, setelah konflik lama usai pada tahun 2001, satu dasawarsa lalu. Banyak pihak yang menganalisis masalah itu di ujungnya, dengan melihat faktor pemicu konflik, dan mengabaikan yang mendasar atau muaranya, yakni faktor demografis. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mengungkap relevansi berulangnya konflik primordial di Kota Ambon dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk, serta penyebarannya. Tulisan ini juga mengungkap relevansi segregasi penduduk dan malfungsi pembangunan, yang telah menyediakan penyebab yang cukup bagi terciptanya konflik massal berulang kali di Kota Ambon, yang faktor pemicunya seringkali hanya masalah individual. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi studi literatur dari sumber-sumber data resmi dan wawancara dengan aparat pemkot dan kalangan akademisi lokal. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Tulisan hasil penelitian ini mengungkap kondisi yang cukup bagi munculnya setiap saat konflik sosial yang bersifat horizontal di Kota Ambon, akibat absennya kebijakan pemerintah pusat dan kota yang terencana untuk bisa mencegah konflik di kemudian hari. Sehingga, bersama-sama dengan malfungsi pembangunan, warga Kota Ambon dibiarkan sendiri harus mengatasi masalahnya, yang setiap saat berujung pada konflik masal.

Selanjutnya, tulisan kedua disajikan oleh Lili Romli yang mengangkat tema berjudul “Format Baru Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945”. Dalam tulisannya tersaji uraian tentang bagaimana format kelembagaan

Dewan Perwakilan Rakyat setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Dijelaskan bahwa Secara legal formal hasil amandemen UUD 1945 terjadi perubahan besar dan mendasar terhadap peran dan kewenangan yang dimiliki DPR. Bila sebelum perubahan peran dan kewenangan DPR relatif lemah *vis a vis* eksekutif, tidak demikian halnya dengan pasca amandemen UUD 1945. Dapat di katakan, hasil amandemen UUD 1945 menghasilkan format baru DPR.

Tulisan ketiga disajikan oleh Handrini Ardiyanti yang mengupas tema berjudul “Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi”. Dalam tulisannya disampaikan bahwa Konflik Sampang Madura pada dasarnya terjadi antara dua kelompok yaitu kelompok Sunni dengan kelompok Syiah yang saling berinteraksi dalam satu wilayah yang sama. Karena itu, tulisan ini bermaksud mengkaji latar belakang terjadinya konflik sosial dan alternatif pemecahannya dari pendekatan sosiologi komunikasi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi diharapkan akan dapat diketahui proses interaksi yang terjadi antar dua kelompok dalam kasus konflik Sampang antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah termasuk di dalamnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik hingga dapat diketahui alternatif pemecahan permasalahannya dari telaah sosiologi-komunikasi.

Tulisan keempat berjudul “Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Desa di Indonesia dan Cina” yang ditulis oleh Debora Sanur Lindawaty. Dalam uraiannya Debora menyampaikan Desa adalah unit pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika masyarakat. Kewenangan Desa atas otonominya memungkinkan Desa untuk bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia pun menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang sudah lama menjadi aspirasi dari desa-desa di Indonesia. Berbeda dengan negara Cina, Cina pada dasarnya tidak memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa, namun pemerintah pusat dan daerahnya selalu memprioritaskan masalah desa hingga Cina memiliki beberapa desa yang maju. Tulisan ini ingin mengkaji tentang Otonomi Desa di Indonesia serta langkah yang perlu diperhatikan dan ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah Indonesia dalam hal penguatan otonomi desa.

Tulisan kelima disajikan oleh Siti Nur Solechah yang berjudul “Studi tentang Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Provinsi Bali”. Dalam uraiannya disajikan hasil penelitian tentang Kedudukan dan kewenangan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Bali, serta lembaga-lembaga yang ada di dua jenis desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi terhadap obyek penelitian, dan *indepth*

interview terhadap beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Desa Dinas di Bali merupakan subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan Desa Pakraman adalah sebutan bagi lembaga adat yang mewadahi masyarakat beragama Hindu yang bermukim di suatu wilayah, dan mengurus urusan budaya dan agama Hindu. Kewenangan Desa (Dinas) adalah urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara kewenangan yang dijalankan oleh Desa Pakraman adalah kewenangan dalam mengurus budaya dan agama Hindu. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Dinas berbeda dengan struktur kelembagaan di Desa Pakraman. Kelembagaan beserta aktivitasnya di dua jenis desa tersebut tidak saling memengaruhi. Karena keduanya tidak saling bersinggungan, sehingga tidak ada kekhawatiran saling melemahkan.

Sebagai tulisan terakhir atau keenam disajikan Ahmad Budiman dengan judul “Optimalisasi Penanganan Surat Pengaduan ke DPR RI”. Dalam tulisannya Ahmad Budiman menyampaikan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat ke DPR RI mendatangkan hasil yang cukup signifikan, baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat, melalui media *online* dan melalui SMS Aspirasi. Namun demikian kondisi ini tidak sebanding dengan kemampuan Dewan dalam menindak lanjuti surat pengaduan masyarakat yang jumlah hingga saat ini masih kurang maksimal. Optimalisasi tindak lanjut surat pengaduan masyarakat perlu diwujudkan dengan kecepatan Alat Kelengkapan DPR RI atau membentuk Pansus/Tim untuk memberikan respon berupa tanggapan atas surat pengaduan masyarakat tersebut.

Dari keenam tulisan yang tersaji pada edisi kali ini terdapat berbagai konsep atas berbagai persoalan yang terjadi di seputar persoalan politik dalam negeri baik persoalan kelembagaan DPR RI, kelembagaan Desa, serta maraknya kasus konflik horizontal di berbagai wilayah. Namun demikian tulisan-tulisan ini pun diupayakan tidak lepas dari realita yang terjadi di lapangan. Untuk itulah redaksi berharap jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada DR. Lili Romli, M.Si, Peneliti Utama LIPI dan DR. Ganewati Wuryandari, MA, Peneliti LIPI sebagai Redaksi Ahli atas berbagai koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam edisi kali ini.

Jakarta, November 2012

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

Mengapa Konflik Berulang Terjadi di Kota Ambon?

Tinjauan Demografi dan Keamanan atas Konflik Horizontal Perkotaan

Konflik horizontal terjadi berulang-ulang di Kota Ambon dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, setelah konflik lama usai pada tahun 2001, satu dasawarsa lalu. Banyak pihak yang menganalisis masalah itu di ujungnya, dengan melihat faktor pemicu konflik, dan mengabaikan yang mendasar atau muaranya, yakni faktor demografis. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mengungkap relevansi berulangnya konflik primordial di Kota Ambon dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk, serta penyebarannya. Tulisan ini juga mengungkap relevansi segregasi penduduk dan malfungsi pembangunan, yang telah menyediakan penyebab yang cukup bagi terciptanya konflik massal berulang kali di Kota Ambon, yang faktor pemicunya seringkali hanya masalah individual. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi studi literatur dari sumber-sumber data resmi dan wawancara dengan aparat pemkot dan kalangan akademisi lokal. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Tulisan hasil penelitian ini mengungkap kondisi yang cukup bagi munculnya setiap saat konflik sosial yang bersifat horizontal di Kota Ambon, akibat absennya kebijakan pemerintah pusat dan kota yang terencana untuk bisa mencegah konflik di kemudian hari. Sehingga, bersama-sama dengan malfungsi pembangunan, warga Kota Ambon dibiarkan sendiri harus mengatasi massalahnya, yang setiap saat berujung pada konflik masal.

Kata Kunci: keamanan demografis, konflik agama, konflik perkotaan, konflik horizontal, Ambon

Poltak Partogi Nainggolan

Why conflicts Vulnerable Occurred in Ambon?

A Demographic-Security Approach to Urban Horizontal Conflicts.

Riots in Ambon often recurred within short intervals since the last 2001 protracted horizontal conflict. Many attempted to partially analyze these phenomena by focusing only the trigger of the riots such as individual crimes and bad police behavior, ignoring to discuss the causes of the conflicts from their roots, namely the demographic factors, such as population growth and its density and interactions. Early data collection of this research was conducted in Jakarta and local libraries and central statistic bureau. Its analysis uses a qualitative method, and its research report was made based on an analytical-descriptive direction. This research reveals that the current structure of Ambonese population, segregation, and development malfunction create a sufficient condition for re-emergence of new social conflict in the city. The cause of these are the absence of the city government's interventions with its policies in controlling and restructuring the population growth and eliminating both the long-existed segregation and the development malfunction. Applying a combination of security studies and urban sociology approaches becomes relevance, and also, fruitful in this research.

Keywords: Demographic security, urban conflicts, horizontal conflicts, religious conflicts, Ambon

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Lili Romli

Menguatnya DPR Pasca Amandemen UUD 1945

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca Orde Baru mengalami perubahan signifikan. Amandemen UUD 1945 menghasilkan format baru DPR, dimana peranan dan kewenangan DPR kuat *vis a vis* eksekutif. Dalam bidang legislasi, menjadi hak sepenuhnya ada pada DPR. Sebagai pembentuk UU DPR memiliki kewenangan membuat UU. Dalam melakukan kontrol dan pengawasan dengan sejumlah hak yang dimiliki secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Dengan ini maka akan memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan menyebutkan hak-hak yang dimiliki DPR dalam batang tubuh UUD 1945 semakin menegaskan perlunya fungsi kontrol dan pengawasan DPR atas jalannya pemerintahan. DPR juga memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan atau menyeleksi dan memberikan persetujuan atas sejumlah lembaga-lembaga negara dan pejabat publik.

Kata Kunci: UUD 1945, Amandemen Konstitusi, DPR.

Lili Romli

The More Powerful of DPR after the Amendments of the 1945 constitution

The amendments of the 1945 constitution have given stronger authority to DPR in making law, conducting its oversight function over executive body, and demonstrating its authority in selecting public officials. The current political situation is, therefore, legislative heavy in nature. This essay focuses on stronger role of DPR after the amendments. Importantly, the change of heavy in the legislative function from executive to legislative, especially in making oversight function, and the sorts of the strengthening role, becomes the main interest of the writer.

Keywords: the 1945 Constitution, Constitutional Amendments, DPR.

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Handrini Ardiyanti

Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi

Konflik Sampang Madura pada dasarnya terjadi antara dua kelompok yaitu kelompok sunni dengan kelompok syiah yang saling berinteraksi dalam satu wilayah yang sama. Karena itu tulisan ini bermaksud mengkaji latar belakang terjadinya konflik sosial dan alternatif pemecahannya dari pendekatan sosiologi komunikasi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi diharapkan akan dapat diketahui proses interaksi yang terjadi antar dua kelompok dalam kasus konflik Sampang antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah termasuk didalamnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik hingga dapat diketahui alternatif pemecahan permasalahannya dari telaah sosiologi komunikasi.

Kata Kunci: Sosiologi komunikasi, Sampang, Madura, Konflik Sektarian, Konflik Agama, sekte Islam.

Handrini Ardiyanti

The Sampang Conflict: A Sociological Communication Approach

Social conflicts in Sampang, Madura, have often occurred between two different groups of Muslim, namely the Sunni and Shiite, who lives in the same region. This essay discusses the background of the social conflict and attempts to propose alternative conflict resolution. The writer argues the need to adopt a combination of sociology and communication approaches which tries to examine deeply the interaction between the two different Islam sects. Through such combination of approach, it is hoped therefore that the cases of the horizontal conflicts can be clearly explained and properly handled.

Keywords: Sociological Communication, Sampang, Madura, Religious Conflict, Islam Sects.

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Debora Sanur Lindawaty

Dukungan Pemerintah terhadap Otonomi Desa:
Perbandingan Desa di Indonesia dan Cina

Desa adalah unit pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika masyarakat. Kewenangan Desa atas otonominya memungkinkan Desa untuk bertanggungjawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia pun menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang sudah lama menjadi aspirasi dari desa-desa di Indonesia. Berbeda dengan negara Cina, Cina pada dasarnya tidak memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa, namun pemerintah pusat dan daerahnya selalu memprioritaskan masalah desa hingga Cina memiliki beberapa desa yang maju. Tulisan ini ingin mengkaji tentang Otonomi Desa di Indonesia serta langkah yang perlu diperhatikan dan ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah Indonesia dalam hal penguatan otonomi desa.

Kata Kunci: Otonomi desa, RUU Desa, regulasi Desa, Indonesia, Cina.

Debora Sanur Lindawaty

*Government Support to Village Autonomy:
A Comparison between Indonesia and Cina*

Village in Indonesia is the lowest governmental hierarchy which is directly in contact with community dynamics. Because of its autonomy, village has to be responsible to manage its own businesses for the interest of local communities. For this reason, the Indonesian government needs to make a bill on village which has been long to become aspirations of many villages in the country. In comparison to this, in Cina, although there is no need to regulate villages in from of law, the central and regional governments give priority to the development of villages. That is why there are many developed villages in Cina, particularly recently. This essay discusses village autonomy in Indonesia, and steps needed to be taken strengthen village autonomy.

Keywords: Village Autonomy, Bill on Village, Village Regulation, Indonesia, Cina.

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Siti Nur Solechah

Studi Tentang Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Provinsi Bali

(Desa Ekasari-Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan Kabupaten Jembrana Bali)

Studi Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas Dan Desa Pakraman di Provinsi Bali (Desa Ekasari Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan, Kabupaten Jembrana, Bali) *Study on the Position and Authority of Desa Dinas and Desa Pakraman in the Bali Province (Ekasari Village in Melaya District and Asah Duren Village in Pakutatan District, Jembrana Municipality, the Bali Province).*

Kata Kunci: Desa Dinas, Desa Pakraman, Kedudukan, Kewenangan, Jembrana, Provinsi Bali.

Siti Nur Solechah

Study on the Position and Authority of Desa Dinas and Desa Pakraman in the Bali Province (Ekasari Village in Melaya District and Asah Duren Village in Pakutatan District Jembrana Municipality the Bali Province)

This essay made based on the research on the status and power of the so-called Official Village (Desa Dinas) and Traditional Village (Desa Pakraman). The research uses a qualitative method whose data gathering is conducted by making observations and in-depth interview. Its findings shows that each type of the villages has its own authority and regulations, in which there are no conflict of interest. There is no worry, therefore, that they will weaken each other.

Keywords: Desa Dinas, Desa Pakraman, Jembrana Municipality, Bali Province, village power, village authority.

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Ahmad Budiman

Optimalisasi Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat ke DPR RI

Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat ke DPR RI mendatangkan hasil yang cukup signifikan, baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat, melalui media online dan melalui SMS Aspirasi. Namun demikian kondisi ini tidak sebanding dengan kemampuan Dewan dalam menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat yang jumlah hingga saat ini masih kurang maksimal. Optimalisasi tindaklanjut surat pengaduan masyarakat perlu diwujudkan dengan kecepatan Alat Kelengkapan DPR RI atau membentuk Pansus/Tim untuk memberikan respon berupa tanggapan atas surat pengaduan masyarakat tersebut.

Kata kunci: Surat Pengaduan Masyarakat, DPR, SMS Aspirasi

Ahmad Budiman

Maximizing the Handling of Public Complaints Letter to House of Representatives

Maximizing the handling of public complaints to the House, whether received by mail or through media online or "SMS Aspiration" has shown significant results. However, this condition is not comparable with the ability of the of the House to follow up the complaints which is still less than expected. Thus the maximizing the follow up of the public complaints letters is an urgent matter in the parliament, which can be conducted by the complementary bodies of the house to form a special committee or working team to deal with all complaints come from public.

Keywords: Public Complaint Letters, DPR, SMS Aspirasi